

**“ANALISIS PENGARUH JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN, JUMLAH
WISATAWAN DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN SLEMAN”
TAHUN 1994-2009**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Nama : Lestari Novi Astuti

Nomor Mahasiswa : 07313067

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2011**

**“ANALISIS PENGARUH JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN, JUMLAH
WISATAWAN DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN SLEMAN”
TAHUN 1994-2009**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang srata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Lestari Novi

Nomor Mahasiswa : 07313067

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

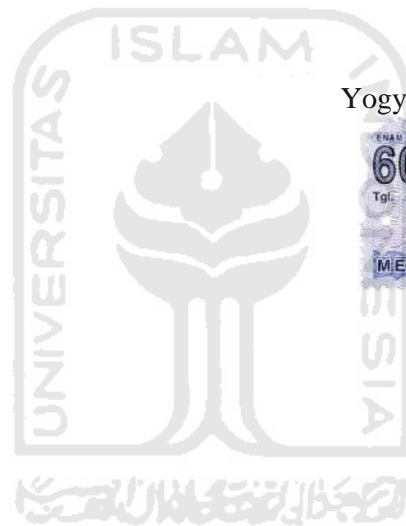
FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, Desember 2011



Penulis,

Lestari Novi

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran, Jumlah Wisatawan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1990 - 2009

Disusun Oleh: **LESTARI NOVI ASTUTI**
Nomor Mahasiswa: **07313067**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 18 Januari 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Rokhedi Priyo Santosa, SE, MIDEc
Penguji I : Dr. Unggul Priyadi, M.Si
Penguji II : Drs. Akhsyim Afandi, MA, Ph.D



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

PENGESAHAN

**“ANALISIS PENGARUH JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN, JUMLAH
WISATAWAN DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN SLEMAN”
TAHUN 1994-2009**

Nama : Lestari Novi
Nomor Mahasiswa : 07313067
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Desember 2011

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing,



Rokhedi P. Santoso, SE., MIDEc

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. Wb.,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENGARUH JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN, JUMLAH WISATAWAN DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN”**

TAHUN 1994-2009

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, namun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat pula bagi berbagai pihak yang ingin memafaatkannya.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan, baik dari segi referensinya maupun keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, tetapi akhirnya semua hambatan itu dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Hadri Kusuma, Prof., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Suharto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Rokhedi P. Santoso, SE., MIDEc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan hingga skripsi ini dapat selesai.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak membantu penulis selama menjadi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Staf dan Karyawan BPS, Kabupaten Sleman, terima kasih atas bantuan dan keramahannya.
6. Bapak dan Ibu di rumah, yang telah berjuang sepenuh hati untuk keberhasilan anak-anaknya, yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik.
7. Kepada yang terkasih Yudhistira Mandala Putra Bangun, terima kasih abang telah menjadi pendukung, motifator, penyemangat dan orang yang selalu menemani adik sampai skripsi ini selesai.
8. Mbak Ita, Mas Tigor, Merry, Risky, Estu, Celyn, Yogi, Haliem, dan keluarga “Ikhlazul Amal” terima kasih atas dorongan, bantuan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat teman-teman IE 2007 terimakasih weny, Zhita, Budi, Indra, Daus, Dwi, Putri dan Otys makasih atas bantuannya selama ini dan tidak akan pernah aku lupakan perjuangan kita dalam pembuatan skripsi dan ujian komprehensif. .
10. Semua pihak yang turut membantu dan mendoakan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan menjadi karya kecil yang dapat berguna bagi kita semua. Walaupun dengan kelebihan dan kekurangannya serta dengan keterbatasan penguasaan ilmu, penulis menyadari akan segala ketidak ketelitian dan kesalahan penulisan skripsi.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.,



Yogyakarta, Desember 2011

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lestari Novi Astuti'.

Lestari Novi Astuti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Halaman Daftar isi	viii
Halaman Daftar Tabel	xii
Halaman Daftar Gambar	xiii
Halaman Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Manfaat dan Tujuan.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
2.1. Kajian Pustaka.....	12
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1 Perpajakan Di Indonesia	15
2.2.2 Aspek Ekonomi Perpajakan	15
2.2.3 Hubungan Pajak Dengan Pendapatan	16
2.2.4 Klasifikasi dan Macam Pajak	16
2.2.5 Fungsi Pajak	19
2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	20
2.2.7 Pajak Daerah.....	21
2.2.8 Pajak-pajak Daerah Di Indonesia.....	22

2.2.9	Azas Pemungutan Pajak.....	23
2.2.10	Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.....	25
2.2.11	Pajak Hotel dan Restoran.....	26
2.2.12	Hubungan Pajak Hotel Dan Restoran Dengan Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.2.13	Inflasi.....	31
2.2.13	Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Jenis dan sumber Data	33
3.1.2	Jenis Data	33
3.1.3	Sumber Data	33
3.2	Metode Pencarian Data	33
3.2.1	Variabel-Variabel Penelitian	33
3.3.	Metode Penelitian	34
3.3.1.	Analisis Kontribusi	34
3.3.2	Analisis Metode Regresi Terkecil/OLS	35
3.3.3	Uji Statistik.....	37
3.3.3.1	Uji t Statistik.....	37
3.3.3.2	Uji f statistic.....	49
3.3.3.3	Koefisien determinasi.....	39
3.3.4	Pengujian Asumsi Klasik.....	40
3.3.4.1	Autokolerasi.....	40
3.3.4.2	Multikolinieritas.....	42
3.3.4.3	Heteroskedastisitas.....	43
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		45
4.1.	Uji Kontribusi.....	45
4.2	Analisis metode Regresi Terkecil/OLS	48
4.2.1	Analisis Regresi	48
4.2.2	Pengujian Koefisien Determinasi.....	49
4.3	Pengujian t Statistik	50
4.3.1	Hipotesis Untuk Uji t	52

4.4. Pengujian F-Statistik	54
4.5 Pengujian Asumsi Klasik	56
4.5.1. Multikolinieritas	56
4.5.2. Heteroskedastisitas	57
4.5.3. Autokorelasi	59
4.6 Interpretasi Hasil Analisis	62
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	64
5.1. Simpulan	64
5.2. Implikasi	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008-2009
- Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Serta Presentasinya Terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman
- Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1994-2009
- Table 4.2 Hasil Regresi Realisasi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Sleman
- Table 4.5 Uji Multikolinieritas Antar Variabel Bebas
- Table 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode White *no cross terms*
- Table 4.7 Hasil uji Autokorelasi Dengan Metode LM Pada Lag 4



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Kurva Uji t Jumlah Hotel dan Restoran	53
4.2 Kurva Uji t Jumlah wisatawan.....	54
4.3 Kurva Uji t Inflasi.....	54



MOTTO

“Don’t put till tomorrow what you can do to day”

“If there is will there is way”

“Experience is the best teacher”

“Jangan pernah melihat ke belakang, lihatlah seperti kuda melihat ketika menjalani hidup”

“Tubtutlah ilmu sampai ke negeri China”

“This is me! Let the sun shine on me, do not one stop it!”



Abstraksi

Penelitian ini berjudul “Analisis Jumlah Hotel dan Restoran, Jumlah Wisatawan dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah tTahun 1994-2009”. Pengujian statistik meliputi uji t dan uji F serta uji asumsi klasik yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Model analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data tahunan periode 1994-2009 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta dan Badan Keuangan Daerah. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Jumlah hotel dan Restoran, Jumlah Wisatawan, dan Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

Hasil regresi antar variable dependent dan independent adalah R-squared = 0.938978 dan F statistik 61.55061 sehingga variabel jumlah hotel dan restoran dan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan sebaliknya inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Untuk pengujian asumsi klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas maupun autokolerasi. Sehingga penulis berharap kepada peneliti yang lain untuk melengkapi baik dengan menambah variabel atau data-data yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang wajib setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Salah satu potensi penting dari suatu daerah adalah pajak. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya sebahagian dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini terbukti karena untuk pemerintah daerah salah satu penerimaan yang potensial berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan, pajak reklame. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah

merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: “Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat umum setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - Hasil pajak daerah.
 - Hasil retribusi daerah.
 - Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - Pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Yogyakarta. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kabupaten Sleman berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis jenis pajak daerah menurut Undang Undang No. 28 tahun 2009 pasal 2 adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak hotel dan restoran memberikan hasil yang cukup besar dan dikarenakan didasarkan persentase tertentu atas uang masuk (10% atau 15% didaerah pariwisata), cukup elastis dalam praktek karena bagian terbesar hotel dan restoran kecil-kecil tidak memberikan kwitansi, uang masuk harus diperiksa, dan harus dilakukan secara berkala agar penerimaan tidak dikalahkan oleh inflasi.

Untuk dapat menyelenggarakan fungsi yang optimal diperlukan dukungan dana yang cukup besar guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain diperoleh dari berbagai jenis pajak daerah, retribusi, hasil investasi dan kegiatan bisnis.

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju sejahtera, mandiri, berkeadilan, Kabupaten Sleman dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.

Kabupaten Sleman dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada mempunyai sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, misalnya sektor industri dan penyediaan sektor jasa. Pariwisata yang merupakan salah satu andalan kota Yogyakarta dan khususnya Kabupaten Sleman adalah satu potensi yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran..

Dengan demikian, dari sumber-sumber pendapatan diatas yang telah disebutkan, maka Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak daerah pengelolaannya dilakukan oleh daerah melalui dinas daerah dan dapat dilakukan terus menerus. Dibawah ini adalah table tentang realisasi jenis

sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2008-2009:

Table 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2008-2009

Jenis pendapatan	2008	2009
Pendapatan asli daerah	61020,89	71044,73
Retribusi daerah	52065,47	54719,43
Pajak dan laba usaha milik daerah	6676,98	9973,16
Pendapatan lain PAD yang sah	20860,00	21493,93
Jumlah PADS	140631,35	157231,26
Pendapatan hasil pajak atau bukan pajak	86195,95	891327,28
Jumlah	592594,92	612938,29
Pendapatan lain yang sah	10151,00	17293,09
Pendapatan lain pendapatan yang sah	116903,19	119270,00
Jumlah	977183,24	1798059,92

Sumber: BPK Sleman dalam angka

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan. Kabupaten Sleman secara terus menerus berupaya keras untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dari Kabupaten itu sendiri sehingga dengan adanya peningkatan penerimaan pajak akan mempengaruhi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan akan memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan, maka semakin banyak fasilitas

maupun jasa yang perlu disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk menunjang kegiatan perekonomian.

Berikut adalah table realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sleman:

Tabel 1.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Serta Presentasinya Terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1994-2009

thun	Realisasi pendapatn rupiah)	Realisasi belanja (rupiah)	Realisasi PAD (rupiah)	Presentase PAD thd pendapatan (%)	Presentase PAD thd belanja (%)
1994	21.361,07	21.070,23	3.467,93	16,23	16,46
1995	24.865,59	24,865,59	5.168,42	20,79	20,79
1996	32.795,12	31.951,04	7.442,33	22,70	23,30
1997	71.707,64	69.499,83	10.574,22	14,74	15,21
1998	90.241,67	89.768,69	13.464,88	14,92	15,00
1999	99.158,54	94.794,97	14.786,41	14,91	16,00
2000	128.038,61	118.532,97	17.889,88	13,98	15,10
2001	308.531,58	293.229,92	29.571,15	9,59	10,08
2002	383.093,69	338.094,05	38.908,19	10,15	11,50
2003	452.884,65	447.510,56	52.987,73	11,70	11,84
2004	491.568,20	488.077,55	70.488,05	14,34	14,44
2005	520.548,87	508.279,54	77.904,74	14,98	15,33
2006	702.929,58	609.765,41	90.710,10	12,90	14,88
2007	825.004,19	752.113,98	120.656,54	14,63	16,04
2008	946.476,03	906.618,99	140.631,36	14,87	15,51
2009	978.323,09	927.322,23	160.873,91	16,44	17,34

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah

Disini dapat kita lihat pada sector pajak hotel dan restoran setiap tahunnya bertambah secara terus menerus dalam jangka waktu 16 tahun, ini menunjukkan

bahwa pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang menjanjikan bagi pendapatan asli daerah.

Pajak Hotel dan Restoran menurut peraturan pemerintah No 28 tahun 2009 mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Pajak Hotel adalah pelayanan pajak yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- Pajak Restoran adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat mempelancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah di Daerah Kabupaten Sleman sebagai pelaksana pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak Hotel dan Restoran. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, maka penulis memilih judul **“ANALISIS PENGARUH JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN, JUMLAH WISATAWAN DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1994-2009”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman..
2. Bagaimana pengaruh jumlah hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.
3. bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.
4. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

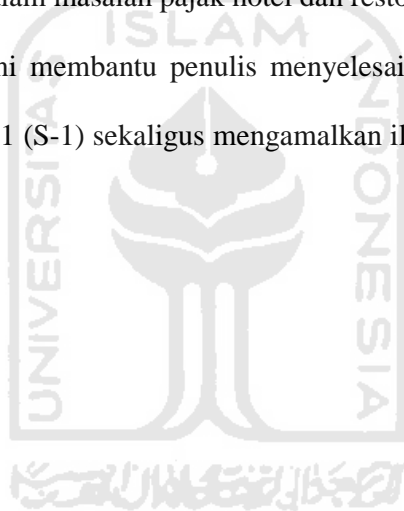
1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah wisatawan nusantara mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.
4. Untuk mengetahui seberapa banyak tingkat inflasi mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

1.3.2. Manfaat yang dapat diperoleh apabila penelitian dapat tercapai yaitu

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mengubah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka), serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam masalah pajak hotel dan restoran.
3. Dengan penelitian ini membantu penulis menyelesaikan studi dalam usaha memperoleh gelar Strata-1 (S-1) sekaligus mengamalkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan



1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian

Bab II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan selanjutnya dijadikan acuan dan referensi awal dalam penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang data yang digunakan serta metode penelitian dan alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.

Bab IV : HASIL DAN ANALISIS

Berisi gambaran umum mengenai daerah penelitian yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, penerimaan pajak hotel dan restoran dan realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

Bab V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab yang terakhir ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi ini muncul sebagai hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dapat ditarik benang merah apa implikasi dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 KAJIAN PUSTAKA

Dari beberapa penelitian yang terdahulu yang sejenis atau studi yang pernah dilakukan, maka kajian pustaka yang dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. “Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 1998-2002” Kuncoro ,Sigit (2002). Hasil dari analisis adalah:

- a. Bahwa pemungutan pajak daerah memberikan kontribusi yang cenderung meningkat.
- b. Tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif.

2. “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dati II Klaten Tahun Anggaran 1983/1984-1999/2000”. Nugroho ,Afrinto (2001). Hasil dari analisis itu adalah :

- a. Sektor pariwisata di Kabupaten Klaten belum memberikan sumbangan yang signifikan (penting) bagi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa objek wisata dengan pengunjung yang cukup besar jumlahnya tidak dipungut bea masuk (retribusi) sebagai sumber pendapatan daerah pariwisata dan

terdapat pula beberapa wajib retribusi tidak memperpanjang ijin usahanya yang telah habis atau tidak melakukan pendaftaran kembali.

b. Keberadaan industri besar dan sedang di kabupaten Klaten belum memberikan sumbangan yang signifikan (penting) bagi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten.

3. “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran“, studi kasus pada Pemkot Surabaya. Muhamad ,Husni(2003).

Hasil dari analisisnya :

- a. Desentralisasi khususnya di bidang keuangan tertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berasal dari berbagai sektor, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya. Pajak daerah merupakan PAD yang bisa diandalkan salah satunya dari pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran di Kodya Surabaya dari tahun ke tahun semakin meningkat, untuk itu perlu diadakan peningkatannya.
- b. Variabel yang dianggap berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dan yang dipilih dalam penelitian ini yang penggunaan alat regresi linier adalah tepat, hal ini dapat dilihat dari besarnya R^2 yang diperoleh adalah 0.897 menunjukkan bahwa dari penerimaan pajak hotel dan restoran dipengaruhi oleh variasi dari pendapatan perkapita, jumlah mahasiswa dan jumlah investasi hotel dan restoran sebesar 89,7%.
- c. Untuk F-test sebesar 40.722 yang lebih besar dari F-tabel menunjukkan secara bersama-sama realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di

kodya Dati II Surabaya dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, jumlah investasi hotel dan restoran.

- d. Dari ketiga hipotesis yang digunakan sebagai pedoman penelitian ini tentang pengaruh variabel independen, ternyata dari tiga variabel independen tersebut ada satu yang tidak berpengaruh secara nyata tetapi positif di dalam uji individu yaitu jumlah mahasiswa.
 - e. Pada penelitian yang menyatakan bahwa koefisien elastisitas untuk variabel independen yaitu pendapatan perkapita, jumlah mahasiswa, investasi hotel dan restoran yang berpengaruh terhadap variabel dependen adalah benar.
1. Elastisitas pendapatan perkapita Kodya Surabaya sebesar 1.195 artinya dengan kenaikan pendapatan perkapita sebesar 1% ceteris paribus, maka realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kodya Surabaya naik sebesar 1.195%.
 2. Elastisitas pendapatan perkapita kodya surabaya sebesar 0.262 artinya dengan kenaikan jumlah mahasiswa 1% ceteris paribus, maka realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran kodya surabaya naik sebesar 0.262%

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 PERPAJAKAN DI INDONESIA

Secara umum di Indonesia penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, yang dapat dibedakan antara penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri, kemudian penerimaan dari badan usaha milik pemerintah. Sedangkan sumber penerimaan lainnya adalah berasal dari pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment Soemitro(2004).

2.2.2 ASPEK EKONOMI PERPAJAKAN

Baiknya system pajak dipandang dari ilmu ekonomi adalah system perpajakan yang memiliki pengaruh baik. Konsep system pajak adalah membahas masalah keadilan sistem pajak. Dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*). Norma keadilan yang ada disini untuk pengenaan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak dapat disebut progresif,

proporsional atau regresi yang membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama Resmi (2003).

2.2.3 HUBUNGAN PAJAK DENGAN PENDAPATAN

Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah proporsional, progresif, dan regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenakan tarif presentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang. Sehingga setiap pembayar pajak dikenakan dalam tarif pajak dalam proporsi yang sama dari pendapatannya. Sedangkan untuk progresif berbeda dengan pajak proporsional dan akan lebih kontras lagi jika dibandingkan dengan pajak progresif Wirawan (2004).

Pajak progresif adalah pajak yang menggunakan tarif dalam presentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang, adapun pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif presentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi.

Istilah progresif dan regresif mungkin akan menimbulkan kecacauan pengertian. Kata-kata itu merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proporsi pajak terhadap berbagai pendapatan.

2.2.4 KLASIFIKASI DAN MACAM PAJAK

Untuk membedakan macam pajak, maka pajak dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi 2, yaitu:

- Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak Wirawan (2004).

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung Resmi (2003).

2. Menurut sifatnya maka pajak dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak penghasilan.

- Pajak obyektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah Wirawan (2004).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari :

- Pajak daerah TK I (Propinsi), contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- Pajak Daerah TK II (kotamadya/kabupaten), contoh : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan Wirawan (2004).

2.2.5 Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak. Karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi *Budgetary* dalam fungsinya sebagai *budgetary*, pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin.
2. Fungsi *Regulateri* sebagai fungsi *Regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.
3. Fungsi sosial dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi yang mutlak untuk kebutuhan primer Resmi (2003).

Cara pemungutan pajak kepada masyarakat ditandai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 terutama rasa keadilannya. Dengan demikian sistem

atau cara pemungutan pajak kepada masyarakat wajib pajak harus melihat beberapa unsur subjektif yang ada bagi wajib pajak, yaitu :

1. Keharusan memberi kebebasan wajib pajak atas pendapatan untuk kehidupan minimum.
2. Keharusan memperhatikan fungsi-fungsi perorangan dan keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, kesehatan dan sebagainya.

Jadi secara umum unsur-unsur subjektif diatas merupakan segala kebutuhan, terutama material dan juga sepirtual, makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, makin kecil kekuatan seseorang untuk membayar pajak Resmi (2003).

2.2.6. Syarat Pemungutan Pajak

Ada empat syarat dalam pemungutan pajak agar tercapai keadilan dan kepastian hukum serta dapat tercapainya fungsi pajak, yaitu :

1. Syarat keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdikan pada keadilan, baik keadilan dalam prinsip mengenai perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari. Keadilan bersifat relatif, maka dalam menentukan keadilan dibidang perpajakan bisa digunakan beberapa acuan atau prinsip sebagai berikut :

- o Keadilan itu akan terasa apabila pajak itu dikenakan untuk merealisasikan tujuan negara yang bersifat menyelenggarakan kesejahteraan untuk rakyat.

- Pedoman umum dalam mengukur keadilan, yaitu asas-asas perbandingan (*evenredigheid*) yang perumusannya adalah setiap anggota masyarakat adalah sama dan sederajat.
- Pemungutan pajak haruslah umum (*algemeenheid*) dan merata (*gelijkheid*).

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan yang legal dan formal, atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya.

3. Syarat Ekonomis

Pada pokoknya pemungutan pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi. Syarat ekonomis ini sejalan dengan fungsi mengatur, oleh karenanya pemungutan pajak diusahakan tidak menghambat usaha rakyat dan membantu dalam menciptakan pemerataan pendapatan nasional.

4. Syarat Finansial

Bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara.

2.2.7 Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak dirumuskan sebagai berikut pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah, yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas

jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan Suparmoko (2004). Menjelaskan tentang peraturan umum pajak daerah dan menyebutkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengertian dari pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik.
2. Mengadakan, megubah, dan meniadakan pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara. Lapangan pajak tingkat bawahan adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara atau daerah tingkat atasan.
4. Apabila suatu daerah tingkat atasan telah menggunakan suatu lapangan pajak, daerah tingkat bawahannya tidak dipekenankan memasuki lapangan pajak itu, akan tetapi dalam peraturan pajak tingkat atasan itu dapat ditentukan bahwa daerah tingkat bawahannya dipekenankan memungut opsen atas pajak daerah tingkat atasannya.

2.2.8 Pajak-Pajak Daerah di Indonesia

Mengenai pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II.

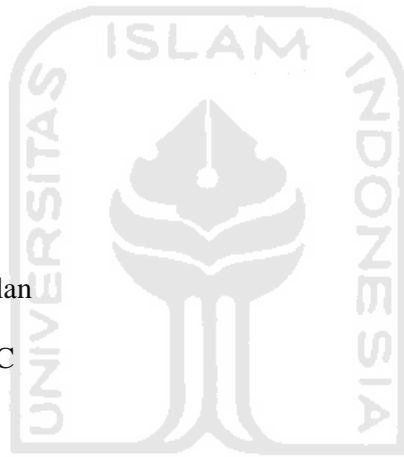
- Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten)

Sedangkan menurut UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat II, antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Bahan Galian C
7. Pajak Parkir.



2.2.9 Azas Pemungutan Pajak Daerah

Azas pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

1. **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak..
2. **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

3. **Asas *Convenience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. **Asas *Efficiency*** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak Wirawan (2004).

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip kesamaan

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi baban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

2. Prinsip kepastian

Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah di mengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

Prinsip kecocokan Pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah Siti (2004).

2.2.10. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat menggunakan berbagai ukuran, yaitu :

1. Pertama, Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

2. Kedua, Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya baban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang lebih banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Ketiga, Daya Guna Ekonomi (*economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

4. Keempat, Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*suitability as a revenue souece*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antara daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah Wirawan (2004).

2.2.11. Pajak Hotel dan Restoran

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 28 tahun 2004 pengertian pajak hotel dan restoran adalah :

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa baga dan katering.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel, restoran dan usaha sejenis. Tarif pajak hotel dan restoran ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha hotel, restoran dan usaha sejenis Resmi (2003).

2.2.12. Hubungan Pajak hotel dan restoran Dengan Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendaptan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1999 diperbarui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa : Pembangunan daerah sebagai sebagian intergal dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Resmi (2003).

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah, yang mana kesemuanya terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pajak hotel dan restoran sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah sangat potensi untuk ditingkatkan mengingat peran pajak hotel dan restoran ini dalam peningkatan PAD. Pajak hotel dan restoran bisa terus diupayakan dan dimaksimalkan pemungutannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan. Bila pembangunan bisa berjalan dengan lancar maka kesejahteraan masyarakat juga diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah maka upaya peningkatan pajak hotel dan restoran untuk menambah keuangan daerah harus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan Wiryawan (2004).

2.2.13 Inflasi

1. Definisi Inflasi :

Yang dimaksud dengan inflasi adalah gejala ekonomi berupa naiknya harga-harga umum secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain:

- Indeks biaya hidup (*consumer price indeks*)
- Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*)
- GNP Deflator

2. Macam-macam inflasi menurut parah tidaknya:

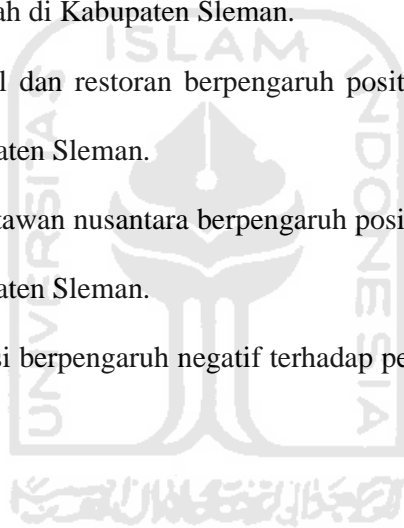
Dalam pengelompokan ini yang diperhatikan adalah berapa besar tingkat inflasi dalam suatu periode.

- Inflasi ringan, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya kurang dari 10% per tahun.
 - Inflasi sedang, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya antara 10% sampai 30% per tahun.
 - Inflasi berat, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya antara 30% sampai 100% per tahun.
 - Hiper inflasi, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya di atas 100% per tahun
- Munir (2004).

2.2.14 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah suatu kesimpulan awal yang masih bersifat sementara. Hipotesis ini digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi, jumlah wisatawan nusantara, secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan realisasi pajak hotel dan restoran. Secara persial pengaruh variabel-variabel tersebut dihipotesiskan sebagai berikut :

1. Diduga kontribusi pajak hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.
2. Diduga Jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.
3. Diduga Jumlah wisatawan nusantara berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.
4. Diduga tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat *time series* yang merupakan data tahunan. Data sekunder adalah data yang merupakan data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahannya (Anto Dajan, 1969, 19) atau data yang tersedia karena sebelumnya sudah diteliti oleh lembaga atau organisasi tertentu, data berupa *time series* dari tahun 1994-2009.

3.1.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa data-data sekunder yang dapat penulis peroleh melalui studi kepustakaan dan dari buku-buku berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Selain penulis juga memperoleh data dari berbagai instansi yang terkait yaitu antara lain:

- a. Badan Keuangan Daerah (BKD)
- b. Badan Pusat Statistik (BPS) D.I.Yogyakarta

3.2 Metode Pencarian Data

Melalui riset kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber yang masih ada kaitannya dengan data. Data yang diperlukan antara lain:

3.3 Variable-variabel Penelitian

- a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau (PAD) yaitu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan, dalam satuan rupiah.

b. Jumlah Hotel dan Restoran

Adalah jumlah hotel dan restoran yang disediakan menjadi fasilitas kenyamanan dan pariwisata bagi para wisatawan.

c. Jumlah Wisatawan

Adalah jumlah pengunjung yang mengunjungi Kabupaten Sleman untuk keperluan berlibur, rekreasi, olahraga, bisnis dan lain-lain.

d. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah prosentase kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Syarat dari kecenderungan naiknya harga yang terus menerus juga perlu diingat. Kenaikan harga karena misalnya, musim, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi.

3.4 Metode Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah, perumusan dan beberapa tujuan penelitian ini akan digunakan langkah-langkah metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

3.4.1 Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah atau besarnya indikator yang dapat digunakan

untuk mengetahui seberapa sumbangan Pajak hotel dan restoran (PHR) terhadap Pendapatan Asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi pajak dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PHR} = \frac{\text{Realisasi PHR}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3.4.2 Analisis Metode Regresi Terkecil/OLS (*Ordinary least square*)

Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS (*Ordinary least square*), dengan fungsi $Y = f (X_1, X_2, X_3)$, maka persamaan regresi liniernya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan Asli Daerah (Rp)
- X₁ = Jumlah hotel dan restoran (unit)
- X₂ = Jumlah Wisatawan (orang)
- X₃ = Laju Inflasi (%)
- β₀ = Konstanta Regresi
- β₁ β₂ β₃ = Koefisien regresi
- e = Kesalahan Pengganggu

Asumsi-asumsi yang terkait dengan model garis regresi linear 2 variabel tersebut adalah: (Widarjono, 2005 : 35-36)

1. Asumsi pertama

Hubungan antara Y (variabel dependen) dan X (variabel independen) adalah linear dalam parameter. Dalam hal ini β_1 berhubungan linear terhadap Y

2. Asumsi kedua

Variabel X adalah variabel tidak stokastik yang nilainya tetap. Nilai X adalah tetap untuk berbagai observasi yang berulang-ulang. Jadi dengan sampel yang berulang-ulang nilai variabel independen (X) adalah tetap atau dengan kata lain variabel independen (X) adalah variabel yang dikontrol.

3. Asumsi ketiga

Nilai harapan (*expected value*) atau rata-rata dari variabel gangguan e_i adalah nol.

4. Asumsi keempat

Varian dari variabel gangguan e_i adalah sama (Homoskedastisitas).

5. Asumsi kelima

Tidak ada serial korelasi antara residual e_i atau residual e_i tidak saling berhubungan dengan e_j

6. Asumsi keenam

Variabel gangguan e_i berdistribusi normal.

Dengan asumsi-asumsi diatas pada model regresi linear klasik, model kuadrat terkecil (OLS) memiliki sifat ideal dengan teorema Gauss-Markov. Metode kuadrat terkecil akan menghasilkan apa yang disebut dengan estimator

yang tidak bias, linear dan mempunyai varian yang BLUE (*best linear unbiased estimators* = BLUE)

Selanjutnya dengan pendekatan model regresi linear kuadrat terkecil (OLS) akan diperoleh parameter estimasi masing-masing variabel independen yang berpengaruh. Agar model tersebut dapat dianggap memenuhi syarat, maka terdapat dua pengujian yang harus dipenuhi, yaitu pengujian statistik yang meliputi uji t, uji f, dan uji determinasi (R^2) serta uji penyimpangan asumsi klasik.

3.4.3 Uji Statistik

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian :

3.4.3.1 Uji t – statistic

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel tidak bebas. Dengan menganggap variabel bebas (independen) lainnya konstan. Kesimpulan hasil uji t dilakukan dengan uji t dapat dilakukan dengan melihat hasil output regresi yang dilakukan E-views dimana jika Probabilitas masing-masing $< 5\%$ (0.05) berarti signifikan begitu juga sebaliknya jika probabilitas $> 5\%$ (0.05) berarti tidak signifikan atau apabila $< 5\%$ berarti secara terpisah variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan :

$H_0 : \beta_i < 0$, maka variabel independen tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen, H_0 ditolak.

$H_a : \beta_i > 0$, maka variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen, H_a diterima.

Pengujian ini dilakukan dengan rumus dari (Gujarati 1995, 124) sebagai berikut :

t-tabel = { ; df (n-k) }

t-hitung =
$$t = \frac{\bar{y}_i - \beta_i}{s_e}$$

Keterangan :

α = *Level of significance*, atau probabilitas (peluang) menolak hipotesis yang benar.

n = Jumlah sampel yang diteliti.

K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.

Se = Standar error.

Bila t hitung > t tabel ($\alpha = n - k$) maka H_0 ditolak, berarti tiap-tiap variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Bila t hitung < t tabel ($1/2 = n - k$) maka H_0 diterima, berarti tiap-tiap variabel tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel devenden.

3.4.3.2 Uji F - statistik

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara sebagai berikut :

Ho : $\beta_i = 0$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel independen.

Ha : $\beta_i \neq 0$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

F hitung didapat dari rumus sebagai berikut;

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah parameter estimasi termasuk konstanta

n = Jumlah sampel

3.4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 menjelaskan seberapa besar persentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R^2 semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu

R^2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

Nilai R^2 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan :

ESS : Jumlah kuadrat yang menjelaskan

TSS : Total kuadrat yang merupakan penjumlahan dari ESS

dan jumlah kuadrat residual (RSS)

3.4.4 Pengujian Asumsi Klasik (OLS)

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan:

3.4.4.1 Autokorelasi

Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Akibat adanya autokorelasi terhadap penaksiran regresi adalah: (Gujarati, 1978: 207)

1. Varian residual nampaknya menaksir terlalu rendah (*underestimate*) varian residual sebenarnya
2. Bahkan jika varian residual tidak ditaksir terlalu rendah, varian dan kesalahan penaksir OLS nampaknya akan menaksir varian terlalu rendah dan juga kesalahan standar yang sebenarnya

3. Pengujian arti t dan F tidak lagi sah, dan jika diterapkan nampaknya memberikan kesimpulan yang menyesatkan secara serius mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir.

Oleh sebab itu untuk mengetahui keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Breusch-Godfrey*. Metode *Breusch-Godfrey* lebih dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Dalam metode ini keputusan ada tidaknya masalah autokorelasi sangat tergantung pada kelambanan (*lag*) yang dipilih. Untuk memilih panjangnya *lag* residual yang tepat dapat menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Akaike dan Schwarz. Berdasarkan kriteria ini, panjang lag (*p*) yang dipilih adalah ketika nilai Akaike dan Schwarz paling kecil. Pada uji ini maka model persamaan akan mengikuti chi-square dengan df sebanyak *p* (*lag*).

Chi-square hitung dirumuskan dengan:

$$(n - p) R^2_p$$

Uji Lagrange Multiplier (LM Test).

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi.

Ho : $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada autokorelasi

Ha : $\rho_1 \neq 0$, Ada autokorelasi

Adapun langkah-langkah dari uji LM ini adalah:

1. Melakukan regresi dengan menggunakan model empiris yang akan diestimasi kemudian mendapatkan nilai residunya.

2. Melakukan regresi dengan u_1 sebagai variabel tidak bebas dan dengan memasukkan u_1 sebagai variabel bebas atau
3. Menghitung nilai $(n-1) * R^2 = F_{hitung}^2$ dari hasil regresi persamaan diatas. $n-1$ karena jumlah efektif dari observasi adalah $n-1$, dimana n adalah jumlah data.
4. Melakukan uji hipotesis nul (H_0) yang menjelaskan bahwa dalam model terdapat autokorelasi, dengan pedoman : apabila nilai F_{hitung}^2 lebih besar dibandingkan nilai F_{tabel}^2 , maka H_0 ditolak, sebaliknya apabila nilai F_{hitung}^2 lebih kecil dibandingkan F_{tabel}^2 , H_0 diterima, maka tidak terjadi autokorelasi.

(Rosyidah 2005 : 50-51)

3.4.4.2 Multikolinearitas

Merupakan keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas (independen) dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari variabel bebas lainnya atau merupakan hubungan linear antara variabel independen dimana dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna dan hubungan linear yang tidak sempurna. Dampak/konsekuensi dari adanya multikolinearitas adalah sebagai berikut: Estimator masih bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dengan adanya multikolinearitas namun estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat (i), Akibat no 1, maka interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan nilai hitung statistik uji t akan kecil sehingga membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel independen (ii), Walaupun secara individual variabel

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui statistik uji t, namun nilai koefisien determinasi (R^2) masih relatif tinggi (iii). (Widarjono, 2005 : 133)

Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan pengujian terhadap masing-masing variabel independen dengan membandingkan antara koefisien determinasi parsial (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2) yang didapat dari hasil regresi secara bersama variabel independen dengan variabel dependen.

Jika r^2 melebihi R^2 pada model regresi maka dari hasil regresi tersebut terdapat multikolinearitas, sebaliknya apabila R^2 lebih besar dari semua r^2 maka hal ini menunjukkan tidak terdapatnya multikolinearitas pada model regresi yang diuji.

$r^2 < R^2 \rightarrow$ tidak ada multikolinearitas

$r^2 > R^2 \rightarrow$ terdapat multikolinearitas

3.4.4.3 Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai variabel yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) melainkan hanya *Linear Unbiased Estimator* (LUE). Konsekuensi jika estimator β_1 tidak mempunyai varian yang minimum adalah sebagai berikut: Jika varian tidak minimum maka menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya (i) serta akibat

no 1 tersebut maka interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun f tidak bisa lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi (ii). (Widarjono, 2005 : 147)

Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji *white*, yaitu tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada residual.

Untuk menjelaskan metode *white*, ditulis model sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + e_i$$

Jika nilai chi-square hitung (χ^2_{hitung}) lebih besar dari nilai χ^2_{tabel} kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari nilai χ^2_{tabel} kritis maka menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Selanjutnya dengan membandingkan antara χ^2_{hitung} dan χ^2_{tabel} akan diketahui adanya heteroskedastisitas atau tidak:

$$\chi^2_{tabel} > \chi^2_{hitung} \rightarrow \text{tidak ada heteroskedastisitas.}$$

$$\chi^2_{tabel} < \chi^2_{hitung} \rightarrow \text{terdapat heteroskedastisitas.}$$

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

4.1 Uji Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah atau besarnya indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa sumbangan Pajak hotel dan restoran (PHR) terhadap Pendapatan Asli daerah. Kontribusi pajak hotel dan restoraan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah.

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PHR} = \frac{\text{Realisasi PHR}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1

Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten
Sleman Tahun Anggaran 1994-2009

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1994	905.772	3.520.269	25,73%
1995	978.668	5.341.982	18,32%
1996	2.064.041	7.442.337	27,73 %
1997	2.262.767	10.583.958	21,37 %
1998	3.090.316	13.364.878	23,12 %
1999	4.105.791	17.125.445	23,97 %
2000	4.910.425	17.889.885	27,45 %
2001	8.276.826	29.571.153	27,99 %
2002	10.023.330	38.908193	25,76 %
2003	10.483.934	53.978.731	19,42 %
2004	13.050.831	70.711.164	18,46 %
2005	13.882.080	77.904.743	17,81 %
2006	13.205.215	90.710.095	14,56 %
2007	16.744.123	120.951.407	13,84 %
2008	20.674.946	140.631.359	14,70 %
2009	25.818.564	157.231.267	16,42 %
Rata-rata			21,00%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah

Dari perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 1994 - 2009 bervariasi antara 13,84 % sampai dengan 27,99 %. Naik turunnya kontribusi pajak hotel dan restoran dikarenakan banyak tidaknya kunjungan ke hotel dan restoran. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 27,99 % dan terendah pada tahun anggaran 2007 yaitu sebesar 13,84 %. Pada tahun 1994 sumbangan yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap PAD sebesar 25,73%, sedang pada tahun 1995 turun menjadi 18,32 % atau mengalami penurunan sebesar 7,41%. Kemudian pada tahun 1996 pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 27,73 %, tahun 1997 turun menjadi 21,37 %, dan tahun 1998 naik sebesar 23,12 %. Pada tahun 1999 kontribusi pajak hotel dan restoran sebesar 23,97 %, tahun 2000 kontribusi pajak hotel dan restoran naik sebesar 27,45 %, tahun 2001 kontribusi pajak hotel dan restoran naik sebesar 27,99 % dan tahun 2002 naik sebesar 25,76 %. Sedangkan pada tahun 2003 naik menjadi 19,42 %, sedangkan pada tahun 2004 turun sebesar 18,46 %, kemudian pada tahun 2005 pajak hotel dan restoran turun menjadi 17,81 % dan tahun 2006 turun menjadi 14,56 % atau turun sebesar 3,25%. Pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 13,84 %, tetapi pada tahun 2008 mengalami peningkatan 14,70 %, dan akhirnya pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 16,42 %

Dari data penghitungan tersebut menunjukkan besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah yang mencapai lebih dari 1 % merupakan suatu yang sangat baik. Dan bisa diambil rata-rata yaitu berkisar

21,00% pertahun. Dalam penghitungan di atas bisa dilihat bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran naik secara signifikan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan.

4.1 Analisis Metode Regresi Terkecil/OLS (*Ordinary least square*)

4.1.1 Analisis Regresi

Analisis data ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar pengaruh jumlah hotel dan restoran (X1), jumlah wisatawan (X2) , dan inflasi (X3) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linier berganda, analisis data linier tersebut dimaksudkan untuk mengetahui hubungan beberapa variabel yang dipilih terhadap Investasi.

Hasil perhitungan regresi yang dihitung dengan menggunakan program Eviews dengan model regresi berganda, maka didapat hasil regresi sebagai berikut

Table 4.2

Hasil Regresi Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Di Kabupaten Sleman

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 07/29/01 Time: 02:11
 Sample: 1994 2009
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.30E+08	14702379	-8.812913	0.0000
X1	676739.3	60417.49	11.20105	0.0000
X2	16848.32	8541.734	1.972471	0.0720
X3	-1111366.	1190929.	-0.933193	0.3691
R-squared	0.938978	Mean dependent var	53491679	
Adjusted R-squared	0.923723	S.D. dependent var	50954991	
S.E. of regression	14072892	Akaike info criterion	35.96972	
Sum squared resid	2.38E+15	Schwarz criterion	36.16286	
Log likelihood	-283.7577	F-statistic	61.55061	
Durbin-Watson stat	0.868295	Prob(F-statistic)	0.000000	

4.1.2 Pengujian Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen dengan semua variabel independen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. dengan semakin dekatnya R^2 dengan 1 semakin tepat pula regresi untuk menjelaskan variabel dependennya. Dari perhitungan diperoleh hasil bahwa nilai R^2 sebesar 0.938978 mengandung arti bahwa seluruh variabel independen mampu

menjelaskan variabel dependen sebesar 93%, sedangkan sisanya sebesar 7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi ini.

4.2 Pengujian t-Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. (Damodar Gujarati, 1995, 74).

$$t\text{-tabel} = \{ \alpha ; df (n-k) \}$$

$$t\text{-hitung} = \frac{t_i}{Se}$$

Keterangan :

α = *Level of significance*, atau probabilitas (peluang) menolak hipotesis yang benar.

n = Jumlah sampel yang diteliti.

K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.

Se = Standar error.

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (*one tail test*), dengan $\alpha = 5 \%$. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, berarti H_0 diterima atau variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, berarti H_0 ditolak atau variabel independen berpengaruh secara signifikan dan

positif terhadap variabel dependen. Dengan menentukan tingkat signifikansi pada

level = 5%, maka akan diperoleh nilai t tabel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t \text{ tabel} &= \{ \quad ; (n-k) \} \\ &= \{ 0,05 ; (16-4) \} \\ &= \{ 0,05 ; 12 \} \\ &= \mathbf{1.782} \end{aligned}$$



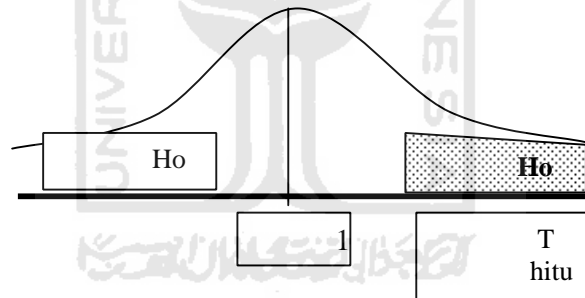
4.2.1 Hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap variabel X1 (jumlah hotel dan restoran).

Koefisien regresi dari variabel X1 (jumlah hotel dan restoran) adalah 676739,3 dan SE sebesar 60417,49 , sedangkan untuk t-hitung adalah 1120105. karena nilai t-hitung adalah $1120105 > t$ table adalah 1.782 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa jumlah hotel dan restoran berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

GAMBAR 4.3

KURVA PENGUJIAN TERHADAP JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN

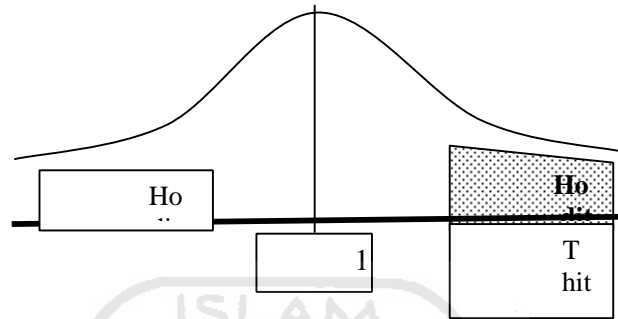


2. Pengujian terhadap variabel X2 (jumlah wisatawan).

Koefisien regresi dari variabel X2 (jumlah wisatawan) adalah 16846,42 dan SE sebesar 8541,173, sedangkan untuk t-hitung adalah 1,972471. karena nilai t-hitung adalah $1,972471 > t$ tabel adalah 1.782 maka H_0 ditolak dan H_a terima. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

GAMBAR 4.3.

KURVA PENGUJIAN TERHADAP JUMLAH WISATAWAN

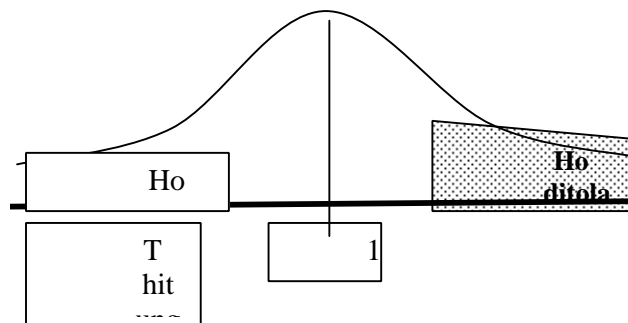


3. Pengujian terhadap variabel X3 (Inflasi).

Koefisien regresi dari variabel X3 (Inflasi) adalah -1111366 dan SE sebesar 8541,734 sedangkan untuk t-hitung adalah -0,933193. karena nilai t-hitung adalah $-0,933193 < t$ tabel adalah 1.782 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

GAMBAR 4.4.

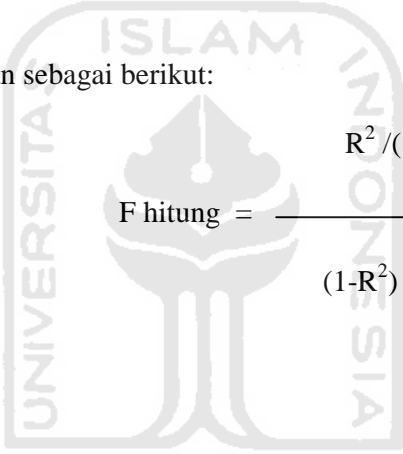
KURVA PENGUJIAN TERHADAP INFLASI



4.3 Pengujian Secara Serempak (uji F)

Uji F digunakan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi juga signifikan dalam menentukan nilai variabel terikat (*dependent variable*), maka diperlukan juga pengujian secara serentak yang menggunakan uji F. Dimana uji F merupakan pengujian terhadap variabel bebas (*independent variable*) secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

F hitung dapat dirumuskan sebagai berikut:


$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

K = Jumlah parameter estimasi termasuk konstanta

N = Jumlah sampel

Jika $F\text{-hitung} < F\text{ tabel}$ berarti H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ berarti H_0 ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

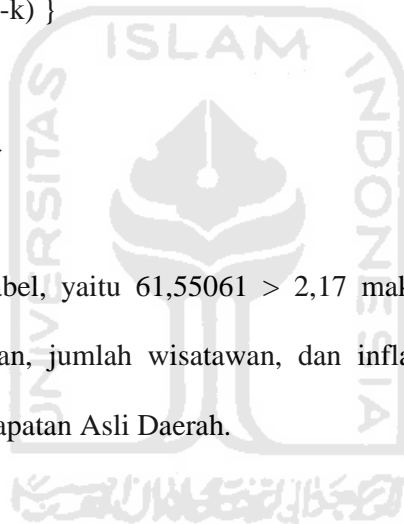
$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen.

Hasil perhitungan yang di dapat adalah F hitung 61,55061

Untuk mencari F tabel maka,

$$\begin{aligned} F \text{ tabel} &= \{ \alpha; df (k-1); (n-k) \} \\ &= \{ 0,05; (4-1); (16-4) \} \\ &= \{ 0,05; 3; 12 \} \\ &= \mathbf{2,17} \end{aligned}$$

Karena F hitung > F tabel, yaitu $61,55061 > 2,17$ maka H_0 ditolak. Artinya jumlah hotel dan restoran, jumlah wisatawan, dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.



4.4. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu pengujian multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas.

4.4.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan linier antara beberapa atau semua variabel bebas. Dengan kata lain variabel bebas yang satu merupakan fungsi yang lainnya. Dengan melihat matrik korelasi dapat dideteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas. Berdasarkan data hasil regresi diketahui bahwa nilai R-squared (R^2) sebesar 0,938976. Apabila R^2 antar variabel bebas $>$ dari R^2 model maka ada indikasi terdapat Multikolinieritas, demikian pula sebaliknya apabila R^2 antar variabel $<$ dari R^2 model maka tidak ada multikolinieritas.

Tabel 4.5

Uji Multikolinieritas Antar Variabel Bebas

variable	R^2 antar variable	R^2	Kesimpulan
X1 terhadap X2	-0,390024	0,938978	Tidak ada multikolinieritas
X1 terhadap X3	0,465946	0,938978	Tidak ada multikolinieritas
X2 terhadap X3	0,152565	0,938978	Tidak ada multikolinieritas

Berdasarkan tabel nilai koefisien korelasi antar variabel bebas, nilai dari koefisien korelasi antar variabel bebas $<$ R^2 sehingga tidak terdapat multikolinieritas pada model persamaan regresi tersebut.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki variasi yang konstan dari variasi satu observasi ke observasi lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji white yang menyatakan jika nilai chi-square hitung (χ^2) < chi-square tabel (χ^2) menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

$$\text{Chi-square tabel } (\chi^2) = \{ \alpha ; df \}$$

$$= \{ 0,05; 7 \}$$

$$= 20,2777$$



Tabel 4.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode White *no cross terms*

White Heteroskedasticity Test

F-statistic	2.072002	Prob. F(6,9)	0.156662
Obs*R-squared	9.281079	Prob. Chi-Square(6)	0.158377

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 07/29/01 Time: 02:47
 Sample: 1994 2009
 Included observations: 16

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.15E+14	1.19E+15	0.517386	0.6174
X1	-8.05E+12	7.70E+12	-1.045658	0.3230
X1^2	1.08E+10	1.43E+10	0.753544	0.4704
X2	1.38E+14	9.57E+13	1.442016	0.1832
X2^2	-6.80E+10	4.71E+10	-1.444303	0.1825
X3	1.15E+14	7.15E+13	1.608354	0.1422
X3^2	-6.41E+12	3.88E+12	-1.653953	0.1325
R-squared	0.580067	Mean dependent var	1.49E+14	
Adjusted R-squared	0.300112	S.D. dependent var	2.06E+14	
S.E. of regression	1.73E+14	Akaike info criterion	68.70306	
Sum squared resid	2.69E+29	Schwarz criterion	69.04107	
Log likelihood	-542.6245	F-statistic	2.072002	
Durbin-Watson stat	1.561693	Prob(F-statistic)	0.156662	

Dalam penelitian ini diperoleh nilai determinasi (R^2) sebesar 0,580067. nilai chi-square hitung sebesar 0.158377 diperoleh dari informasi Obs * R-squared yaitu jumlah observasi dikalikan dengan koefisien determinasi. Sedangkan nilai chi square tabel (χ^2) pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 7 adalah **20,2777**. Karena nilai chi-squares hitung (χ^2) lebih kecil dari pada nilai chi squares (χ^2) tabel maka dapat disimpulkan bahwa dalam model persamaan yang digunakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mendeteksi adanya korelasi anggota observasi satu dengan observasi lainnya yang berlainan waktu. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yaitu dengan memasukkan variabel kelambanan (*Lag*). Panjang lag yang dipilih adalah ketika kriteria Akaike dan Schwarz paling kecil.

Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (d^2) atau dengan uji LM Test yang dikembangkan oleh Bruesch-godfrey, dimana uji LM Test bisa dikatakan sebagai uji autokorelasi yang paling akurat (Kuncoro, 2001, 107), apalagi jika sampel yang digunakan dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 100). Uji ini dilakukan dengan memasukkan lag nya, dari hasil uji autokorelasi *Serial Correlation LM Test Lag 4* sebagaimana terlampir dalam hasil olah data, terlihat bahwa nilai F-Statistik sebesar 1.275402 dengan nilai probabilitas sebesar 0.075622. sedang nilai Obs*R square sebesar

10.56541 dengan nilai probabilitas sebesar 0.355538. Dari hasil ini terlihat bahwa nilai F-Statistik dan Obs*R square tidak signifikan pada alpha 5%, dengan kata lain nilai chi-squares hitung lebih kecil dari nilai kritisnya maka kita menerima hipotesis nul, artinya model tidak mengandung unsur autokorelasi.



Tabel 4.7

Hasil uji Autokorelasi Dengan Metode LM Pada Lag 4

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	1.275402	Prob. F(4,8)	0.355538
Obs*R-squared	6.230207	Prob. Chi-Square(4)	0.182603

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID
 Method: Least Squares
 Date: 07/29/01 Time: 02:53
 Sample: 1994 2009
 Included observations: 16
 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-.11435708	24163633	-0.473261	0.6487
X1	12040.37	85560.67	0.140723	0.8916
X2	-1920.644	8544.129	-0.224791	0.8278
X3	1387057.	1384461.	1.001875	0.3457
RESID(-1)	0.788705	0.390433	2.020075	0.0780
RESID(-2)	0.415042	0.534973	0.775817	0.4602
RESID(-3)	-0.109818	0.523565	-0.209750	0.8391
RESID(-4)	-0.057457	0.523154	-0.109827	0.9153

R-squared	0.389388	Mean dependent var	-1.16E-08
Adjusted R-squared	-0.144898	S.D. dependent var	12587177
S.E. of regression	13468266	Akaike info criterion	35.97642
Sum squared resid	1.45E+15	Schwarz criterion	36.36272
Log likelihood	-279.8114	F-statistic	0.728801
Durbin-Watson stat	1.811413	Prob(F-statistic)	0.655154

4.5 Interpretasi Hasil Analisis

Dalam analisis ini menyatakan bahwa variabel-variabel penelitian yang diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman dan diuji dengan menggunakan data selama 16 tahun observasi, yaitu dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2009 adalah Jumlah Hotel dan Restoran, Jumlah wisatawan, dan Inflasi yang berlaku sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependent. Pengaruh variabel-variabel penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dengan menggunakan rumus regresi berganda, hasil estimasi atau persamaan yang dapat diperoleh model sebagai berikut:

$$Y = -1.30E+08 + 676739.3X_1 + 16848.32X_2 - 1111366X_3$$

Dalam variable independen jumlah hotel dan restoran (X_1) terbukti bahwa jika jumlah hotel dan restoran naik sebesar 1 unit maka pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman akan naik juga sebesar 676739,3 rupiah, menunjukkan bahwa semakin bertambah kualitas dan kuantitas suatu hotel akan mempengaruhi minat para wisatawan menggunakan jasa hotel tersebut.

Pada variabel jumlah wisatawan (X_2) terbukti bahwa jika jumlah wisatawan naik sebanyak 1 jiwa maka pendapatan asli daerah juga akan naik sebesar 16848.32 rupiah, menunjukkan bahwa banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sleman akan menentukan juga pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

Dalam variabel inflasi (X3) menunjukkan bahwa kenaikan inflasi berimbas buruk terhadap pendapatan asli daerah karena jika inflasi naik pendapatan pasti akan turun.



BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil studi dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel jumlah hotel dan restoran terbukti berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman (Y). jumlah hotel dan restoran naik sebesar 1%, maka pendapatan asli daerah naik sebesar 676739.3 rupiah. Menunjukkan bahwa penurunan jumlah hotel dan restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.
2. Variabel jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman (Y), jumlah wisatawan naik sebesar 1%, maka pendapatan asli daerah juga akan naik sebesar 16848.32 rupiah. Menunjukkan bahwa menurunnya jumlah wisatawan mempengaruhi banyaknya pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.
3. Variabel inflasi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman (Y), tingkat inflasi naik sebesar 1% maka akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar 1111366 rupiah. Menunjukkan bahwa dengan naiknya tingkat inflasi maka infestor dan pemegang saham lain enggan untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman maka ini akan berdampak kurang baik bagi pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh daerah.

5.2. Implikasi/Saran

Adapun hasil penelitian diatas penulis memberi implikasi/saran sebagai berikut:

1. Pada jumlah hotel dan restoran yang berpengaruh signifikan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan kuantitas dan kualitas hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Sleman dengan cara memperbaiki fasilitas yang ada untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa hotel dan restoran.
2. Pada jumlah wisatawan yang signifikan pemerintah juga harus memperbaiki sarana dan prasarana pariwisata yang ada untuk mengundang lebih banyak wisatawan berkunjung kembali agar retribusi pariwisata bertambah supaya bisa mendapatkan pendapatan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Untuk inflasi yang tidak signifikan pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman dikarenakan, seharusnya pemerintah memperkecil angka inflasi di daerah dengan memperbanyak investor dan usaha lain untuk menambah perbendaharaan daerah karena jika pendapatan asli daerah naik inflasi diharapkan bisa turun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan (1994-2009), *Sleman dalam Angka*, BPK, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (1994-2009), *Badan Pusat Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah*, BPS, Indonesia.
- Gujarati, Damodar (2003), *Econometric*, Erlangga, Jakarta.
- M. Suparmoko (1987), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.
- M. Husin., “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran (studi kasus pada Pemkot Surabaya)*”, Skripsi sarjana (Tidak dipublikasikan), FE UII, Yogyakarta.
- N. Alis Risbayani (2004), *Peran Dan Potensi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*, Skripsi Sarjana, FE UII, Yogyakarta.
- Nugroho, Afriyanto (2000), “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dati II Klaten Tahun Anggaran 1983/1984-1999/2000*”, Skripsi sarjana (Tidak dipublikasikan), FE UII, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, (2003), *Perpajakan*, edisi pertama, hal 6-8, salemba empat, Jakarta.
- Soelisyo, pengantar ekonometrika I, hal 235-236, BPFE, Yogyakarta.

- Sigit, Kuncoro (1988), *Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 1998-2002*, Skripsi sarjana (Tidak dipublikasikan), FE UII, Yogyakarta.
- Wirawan b. Ilyas, (2004), *Hukum Pajak*, edisi revisi, salemba empat, Jakarta
- Widarjono, Agus (2005), *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi*, Edisis Pertama,
FE UII, Yogyakarta.



LAMPIRAN

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran 2008-2009

Jenis pendapatan	2008	2009
Pajak daerah	61020,89	71044,73
Retribusi daerah	52065,47	54719,43
Bagian laba usaha milik daerah	6676,98	9973,16
Lain-lain PAD yang sah	20860,00	21493,93
Jumlah PADS	140631,35	157231,26
Bagi hasil pajak atau bukan pajak	86195,95	891327,28
DAU	592594,92	612938,29
DAK	10151,00	17293,09
Lain-lain pendapatan yang sah	116903,19	119270,00
Jumlah	977183,24	1798059,92

Sumber: BPK Sleman dalam angka



**Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Serta Presentasinya Terhadap
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 1994-2009**

Tahun	Realisasi pendapatan (juta rupiah)	Realisasi belanja (juta rupiah)	Realisasi PAD (juta rupiah)	Presentase PAD thd pendapatan (%)	Presentase PAD thd belanja (%)
1994	21.361,07	21.070,23	3.467,93	16,23	16,46
1995	24.865,59	24.865,59	5.168,42	20,79	20,79
1996	32.795,12	31.951,04	7.442,33	22,70	23,30
1997	71.707,64	69.499,83	10.574,22	14,74	15,21
1998	90.241,67	89.768,69	13.464,88	14,92	15,00
1999	99.158,54	94.794,97	14.786,41	14,91	16,00
2000	128.038,61	118.532,97	17.889,88	13,98	15,10
2001	308.531,58	293.229,92	29.571,15	9,59	10,08
2002	383.093,69	338.094,05	38.908,19	10,15	11,50
2003	452.884,65	447.510,56	52.987,73	11,70	11,84
2004	491.568,20	488.077,55	70.488,05	14,34	14,44
2005	520.548,87	508.279,54	77.904,74	14,98	15,33
2006	702.929,58	609.765,41	90.710,10	12,90	14,88
2007	825.004,19	752.113,98	120.656,54	14,63	16,04
2008	946.476,03	906.618,99	140.631,36	14,87	15,51
2009	978.323,09	927.322,23	160.873,91	16,44	17,34

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Sleman Tahun 1994-2009

Rp (000)

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1994	905.772	3.520.269
1995	978.668	5.341.982
1996	2.064.041	7.442.337
1997	2.262.767	10.583.958
1998	3.090.316	13.364.878
1999	4.105.791	17.125.445
2000	4.910.425	17.889.885
2001	8.276.826	29.571.153
2002	10.023.330	38.908.193
2003	10.483.934	53.978.731
2004	13.050.831	70.711.164
2005	13.882.080	77.904.743
2006	13.205.215	90.710.095
2007	16.744.123	120.951.407
2008	20.674.946	140.631.359
2009	25.818.564	157.231.267

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah

Jumlah Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman

Tahun 1994-2009

Tahun	Jumlah Hotel dan Restoran (unit)
1994	162
1995	176
1996	198
1997	211
1998	220
1999	225
2000	242
2001	255
2002	278
2003	296
2004	333
2005	337
2006	364
2007	386
2008	392
2009	398

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Sleman

Tahun 1994-2009

Tahun	Jumlah Wisatawan Nusantara (unit)
1994	2030
1995	2.382
1996	2.750
1997	2.376
1998	3.081
1999	2.557
2000	3.688
2001	3.494
2002	2.156
2003	2.864
2004	3.951
2005	3.976
2006	4.753
2007	4.938
2008	5.052
2009	6.432

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Sleman

Laju Insflasi di Kabupaten Sleman

Tahun 1994-2009

Tahun	Tingkat Inflasi (%)
1994	9,64
1995	5,40
1996	3,05
1997	4,75
1998	3,31
1999	2,52
2000	3,57
2001	12,55
2002	10,33
2003	5,89
2004	6,58
2005	15,48
2006	10,88
2007	7,18
2008	10,16
2009	8,54

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

**Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten
Sleman Tahun Anggaran 1994-2009**

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1994	905.772	3.520.269	25,73%
1995	978.668	5.341.982	18,32%
1996	2.064.041	7.442.337	27,73 %
1997	2.262.767	10.583.958	21,37 %
1998	3.090.316	13.364.878	23,12 %
1999	4.105.791	17.125.445	23,97 %
2000	4.910.425	17.889.885	27,45 %
2001	8.276.826	29.571.153	27,99 %
2002	10.023.330	38.908193	25,76 %
2003	10.483.934	53.978.731	19,42 %
2004	13.050.831	70.711.164	18,46 %
2005	13.882.080	77.904.743	17,81 %
2006	13.205.215	90.710.095	14,56 %
2007	16.744.123	120.951.407	13,84 %
2008	20.674.946	140.631.359	14,70 %
2009	25.818.564	157.231.267	16,42 %
Rata-rata			21,00%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah

Hasil Regresi Realisasi Pajak Hotel Dan Restoran

Di Kabupaten Sleman

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 07/29/01 Time: 02:11
 Sample: 1994 2009
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.30E+08	14702379	-8.812913	0.0000
X1	676739.3	60417.49	11.20105	0.0000
X2	16848.32	8541.734	1.972471	0.0720
X3	-1111366.	1190929.	-0.933193	0.3691
R-squared	0.938978	Mean dependent var	53491679	
Adjusted R-squared	0.923723	S.D. dependent var	50954991	
S.E. of regression	14072892	Akaike info criterion	35.96972	
Sum squared resid	2.38E+15	Schwarz criterion	36.16286	
Log likelihood	-283.7577	F-statistic	61.55061	
Durbin-Watson stat	0.868295	Prob(F-statistic)	0.000000	

Uji Multikolinieritas Antar Variabel Bebas

variable	R ² antar variable	R ²	Kesimpulan
X1 terhadap X2	-0,390024	0,938978	Tidak ada multikolinieritas
X1 terhadap X3	0,465946	0,938978	Tidak ada multikolinieritas
X2 terhadap X3	0,152565	0,938978	Tidak ada multikolinieritas

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode White *no cross terms*

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	2.072002	Prob. F(6,9)	0.156662
Obs*R-squared	9.281079	Prob. Chi-Square(6)	0.158377

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 07/29/01 Time: 02:47
 Sample: 1994 2009
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.15E+14	1.19E+15	0.517386	0.6174
X1	-8.05E+12	7.70E+12	-1.045658	0.3230
X1^2	1.08E+10	1.43E+10	0.753544	0.4704
X2	1.38E+14	9.57E+13	1.442016	0.1832
X2^2	-6.80E+10	4.71E+10	-1.444303	0.1825
X3	1.15E+14	7.15E+13	1.608354	0.1422
X3^2	-6.41E+12	3.88E+12	-1.653953	0.1325
R-squared	0.580067	Mean dependent var	1.49E+14	
Adjusted R-squared	0.300112	S.D. dependent var	2.06E+14	
S.E. of regression	1.73E+14	Akaike info criterion	68.70306	
Sum squared resid	2.69E+29	Schwarz criterion	69.04107	
Log likelihood	-542.6245	F-statistic	2.072002	
Durbin-Watson stat	1.561693	Prob(F-statistic)	0.156662	

Hasil uji Autokorelasi Dengan Metode LM Pada Lag 4

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.275402	Prob. F(4,8)	0.355538
Obs*R-squared	6.230207	Prob. Chi-Square(4)	0.182603

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/29/01 Time: 02:53

Sample: 1994 2009

Included observations: 16

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11435708	24163633	-0.473261	0.6487
X1	12040.37	85560.67	0.140723	0.8916
X2	-1920.644	8544.129	-0.224791	0.8278
X3	1387057.	1384461.	1.001875	0.3457
RESID(-1)	0.788705	0.390433	2.020075	0.0780
RESID(-2)	0.415042	0.534973	0.775817	0.4602
RESID(-3)	-0.109818	0.523565	-0.209750	0.8391
RESID(-4)	-0.057457	0.523154	-0.109827	0.9153

R-squared	0.389388	Mean dependent var	-1.16E-08
Adjusted R-squared	-0.144898	S.D. dependent var	12587177
S.E. of regression	13468266	Akaike info criterion	35.97642
Sum squared resid	1.45E+15	Schwarz criterion	36.36272
Log likelihood	-279.8114	F-statistic	0.728801
Durbin-Watson stat	1.811413	Prob(F-statistic)	0.655154